

Intervensi Militer Perancis di Mali: Sekularisme vs Fundamentalisme Islam

Husnul Murtadlo

*Departemen Hubungan Internasional
Universitas Airlangga*

ABSTRACT

Paper examines the military intervention driven by ideational factors anti-fundamentalisme perception that Islam is shaped by secularism. It took the case of Mali crisis where groups of Islamic fundamentalism, Ansar Dine, seeks to replace the secular government with a government based on sharia Mali. Political and military condition of the post-coup has weakened Mali. For that reason, President Traore asked for help from the UN and France. French military then intervened by launching Operation Serval. Paper finds that ideational factors such as strengthening anti-fundamentalism perception of Islam in the French political elite is a determinant factor behind the military intervention in Mali in January 2013.

Keywords: *secularism, military intervention, and perception of Islam anti-fundamentalisme*

Tulisan ini mengkaji tentang intervensi militer yang didorong oleh faktor ideasional yakni persepsi anti-fundamentalisme Islam yang dibentuk oleh sekularisme. Tulisan ini mengambil kasus krisis Mali di mana terdapat kelompok fundamentalisme Islam, Ansar Dine, yang berusaha mengganti pemerintahan sekuler Mali dengan pemerintahan berdasarkan syariah. Kondisi politik dan militer paska kudeta telah melemahkan Mali. Menanggapi hal tersebut, Presiden Traore meminta bantuan kepada PBB dan Perancis. Perancis kemudian melakukan intervensi militer dengan meluncurkan Operasi Serval. Penelitian ini berkesimpulan bahwa faktor ideasional berupa penguatan persepsi anti-fundamentalisme Islam di kalangan elit Politik Perancis merupakan faktor determinan di balik intervensi militer di Mali pada Januari 2013.

Kata Kunci: sekularisme, intervensi militer, persepsi anti-fundamentalisme Islam

Pada bulan Januari 2013, kelompok fundamentalis Islam (Ansar Dine yang didukung oleh Al-Qaida di wilayah Maghrib) melakukan serangan terhadap Ibu Kota Mali, Bamako. Serangan tersebut berada di luar kontrol Ansar Dine di Konna. Presiden sementara Mali, Dioncounda Traore, kemudian meminta bantuan kepada PBB dan Perancis untuk melawan kelompok fundamentalis Islam yang ingin mengganti pemerintahan sekuler Mali dengan pemerintah berdasarkan syariah. Perancis, yang sejak awal melakukan pendekatan politik dengan menetapkan posisi dalam krisis Mali sebagai fasilitator untuk menggalang solusi internasional, kemudian pada tanggal 11 Januari 2013 melakukan intervensi militer dengan meluncurkan Operasi Serval (Francis 2013). Intervensi militer Perancis menunjukkan perubahan pendekatan yang dilakukan oleh Perancis dalam menyelesaikan krisis di Mali dari pendekatan politik ke militer.

Terkait keputusan Perancis untuk melakukan intervensi militer, tulisan ini berargumen bahwa penguatan persepsi antifundamentalisme Islam di kalangan elite politik Perancis merupakan faktor determinan di balik intervensi militer Perancis di Mali pada Januari 2013. Untuk menjelaskan argumen, tulisan ini disusun dalam empat bagian. Bagian pertama membahas kerangka pemikiran. Bagian kedua membahas sekularisme dan persepsi antifundamentalisme Islam. Bagian ketiga membahas pengaruh sekularisme dalam kebijakan luar negeri dan dilanjutkan dengan kesimpulan sebagai bagian akhir.

Persepsi Anti-fundamentalisme Islam dalam Intervensi Militer

Intervensi militer merupakan bagian dari solusi untuk menghentikan perang internal. Sebagai bagian dari kebijakan luar negeri suatu negara, Regan (2002) menjelaskan bahwa keputusan untuk intervensi militer dipengaruhi oleh konsiderasi domestik dan internasional. Konsiderasi internasional memuat transformasi lingkungan internasional usai perang dingin yang memunculkan tantangan transnasional baru seperti terorisme (Karboo et al. 2012). Hal ini menandai munculnya isu agama dalam hubungan internasional serta interkonektifitasnya. Menurut Philpott (2002) dan Petito & Hatzopoulos (2003), isu agama muncul terutama usai tragedi 11 September 2001 dan menjadi antitesis sistem sekuler Westphalia yang telah mengasingkan agama sebagai pembenaran untuk berperang. Selain itu, interkonektifitas ditandai dengan perhatian komunitas internasional terhadap masalah domestik (Karboo et al. 2012). Akibatnya, perang internal yang diakibatkan isu agama tidak lepas dari perhatian utama internasional (Fox 2001).

Terkait fundamentalisme Islam, budaya politik yang mempengaruhi intervensi militer adalah sekularisme (Duward & Marsden 2013). Sekularisme (*laïcité*) merupakan pandangan politik tentang relokasi pengaruh agama dari politik ke ranah privat (Hurd 2008; Cassanova 2007). Ketika agama melawan tatanan sosial-politik sekuler, agama dikonseptualisasikan oleh Van der Veer dan Lehman sebagai fundamentalisme agama. Menurut Falk, fundamentalis agama yang memaksakan agama dalam ranah politik cenderung melakukan ekstremisme bahkan terorisme (Hurd 2007; Hayness 2009). Oleh karena itu, fundamentalisme agama harus disekularisasi (Hurd 2004; 2008). Seperti sekularisasi Perancis yang menjadi tradisi budaya politik (Hurd 2008).

Selama budaya politik membentuk persepsi dan reaksi refleksif, sekularisme membentuk persepsi anti-fundamentalisme Islam sebagai penolakan sekularisme terhadap pewujudan agama dalam politik. Dalam tulisan ini, reaksi refleksif dari persepsi anti-fundamentalisme agama elit politik adalah kebijakan intervensi militer. Dari sini, dapat ditarik pemahaman bahwa intervensi militer dalam kaitannya dengan isu Islam tidak lepas dari faktor ideasional yakni persepsi anti-fundamentalisme Islam yang mempengaruhi elit politik untuk memutuskan kebijakan intervensi militer ke Mali yang mengalami perang internal akibat upaya kelompok fundamentalis Islam yang bertujuan untuk mengganti pemerintah sekuler Mali dengan pemerintahan berdasarkan syariah.

Sekularisme dan Penguatan Anti-fundamentalisme Islam Di Perancis

Sekularisasi Perancis terjadi sejak Revolusi Perancis tahun 1789 yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh Gereja Katolik dari praktek politik. Proses sekularisasi menimbulkan perpecahan dan konfrontasi antara kelompok revolusi dan Gereja Katolik yang berkepanjangan (Tarhan 2011). Oleh karena itu, menurut Baubérot (2009), sekularisme merupakan produk dari proses konfliktual antara negara dan Gereja Katolik di akhir abad kesembilan belas yang diselesaikan secara perlahan.

Ada dua periode utama kemunculan sekularisme Perancis yakni lima tahun setelah Revolusi Perancis dan antara 1879 ke 1905. Periode pertama dilakukan dengan menghapus status Gereja Katolik sebagai

agama negara dan mengeluarkan berbagai kebijakan seperti halnya keputusan Treilhard 13 Februari 1790 meliputi nasionalisasi aset gereja dan memberikan kesetaraan agama sebagai wujud kesetaraan sipil dari “*droit de l'homme et du citoyen*” 1789 dan *the civil constitution of clergy* tahun 1790, 1791 dan 1792 yang mereformasi struktural gereja (Gunn 2004; Doyle 2001).

Pada periode kedua, Partai Republik menguasai Parlemen pada tahun 1879 dan mengeluarkan kebijakan *anticlerical* untuk meregulasi sistem pendidikan yang dikuasai oleh gereja untuk menjadi sistem pendidikan sekuler dengan menghapus mata pelajaran agama dari kurikulum sekolah dan melarang anggota asosiasi keagamaan mengajar di sekolah (Kuru 2008; Guille 2011). Akhirnya sekularisme ditetapkan secara prinsip melalui undang-undang 1905 yang dipahami sebagai hukum yang menetapkan pemisahan agama dan negara dan kaidah dari seluruh aktivitas prinsip sekularisme Perancis (Baubérot 2007) dan kemudian menjadi prinsip konstitusional 1946 dan 1958 yang disebutkan pada pasal 1 bahwa “France shall be an indivisible, secular (*laïque*), democratic and social Republic” (Troper 2009). Sekularisme diwujudkan dalam prinsip-prinsip konstitusional yang dijunjung tinggi, yakni prinsip kesetaraan terkait perlakuan yang sama oleh negara terhadap kelompok agama (Troper 2009), prinsip toleransi yakni jaminan terhadap kebebasan beragama dan menjalankan agama (Barbier 2005), dan prinsip netralitas yang terwujud dalam peran negara dalam mempertahankan prinsip sekularisme dengan menentukan mana agama yang baik dan buruk atau antara kelompok fundamentalis agama dan teroris dan agama toleran dan damai. Sehingga netralitas sekularisme menjadi sumber kebijakan negara dalam upaya netralisasi agama yang buruk menuju agama yang sesuai dengan prinsip sekularisme (Liogier 2009).

Selain itu, sekularisme menjadi modalitas produktif kekuasaan yang membentuk batasan antara politik dan agama dan memproduksi jenis identitas politik kolektif yang sekuler dengan mengeluarkan identitas gereja (Hurd 2008; Baubérot 2008). Karena itu, sekularisme tidak hanya dipahami hanya sebagai pakta hukum dan konstitusi tetapi juga budaya politik Perancis. Setelah menetapkan sekularisme dengan melawan pengaruh Gereja Katolik, Perancis kemudian melawan fundamentalisme Islam.

Perlawanan terhadap fundamentalisme Islam diawali pada periode 1980-an. Di tahun-tahun tersebut isu anti-migran menjadi semakin

kompleks dengan kekhawatiran terhadap peningkatan penegasan komunitas muslim seperti halnya aksi mogok pekerja muslim di industri otomotif. Hal ini dianggap sebagai aksi militant Islam oleh banyak politisi dan media (Wihtol de Wenden 1996). Kekhawatiran semakin meningkat ketika isu jilbab pada tahun 1989 diberitakan secara nasional dengan artikel provokatif dan menghubungkan antara jilbab dan fundamentalisme yang mengancam sekularisme (Baubérot dalam Cady dan Hurd 2010). Sejak saat itu, isu-isu terkait Islam tidak lepas dari dimensi sekularisme. Hal ini mendorong pemerintah memperkuat penerapan prinsip sekularisme dan identitas nasional dengan menetralisasi Islam agar sesuai dengan sekularisme (Baubérot 2009). Penguatan ini terwujud dengan keputusan pemerintah untuk membentuk lembaga muslim dengan tujuan sekularisasi umat muslim seperti halnya lembaga Masjid Agung Paris, CORIF, dan *French Council of the Muslim Faith* (CFCM).

Pasca 9/11, penguatan sekularisme terwujud dalam pengesahan undang-undang (UU) anti jilbab tahun 2004. Pemerintah, akademisi dan media Perancis menilai jilbab di ruang publik sekuler sebagai upaya fundamentalisme Islam merampas hak perempuan dan menerapkan klaim hukum agama dalam ruang publik sekolah sekuler. Sedangkan penerapan sekularisme dilakukan melalui perlindungan negara terhadap ruang publik dan individu dari klaim agama (Scott dalam Tropper t.t). Sehingga UU anti jilbab dianggap oleh pemerintah, akademisi dan media Perancis sebagai bentuk perlawanan terhadap semakin besarnya pengaruh fundamentalisme Islam nasional dan yang terhubung dengan fundamentalisme Islam internasional (Bishop 2011).

Penguatan persepsi anti-fundamentalisme Islam sebagai bentuk penguatan sekularisme Perancis sejak isu jilbab pertama 1989 sampai usai peristiwa 9/11, terwujud dalam ketetapan hukum anti jilbab pada 2004 dan hukum pelarangan burqa pada tahun 2010. Pengaruh ini juga bisa dilihat dari Presiden Hollande yang menyatakan bahwa “sekularisme merupakan prinsip yang menentukan dan mengilhami perilaku saya”. Dalam pernyataannya, Hollande juga memberi sinyal tentang praktek Islam di ruang publik yang harus dinetralkan atau disekulerkan (CLR 2012). Setengah tahun pertama sejak menjabat sebagai presiden pada bulan Mei 2012, Presiden Hollande dan Manuel Vall, Menteri Dalam Negeri, telah berkali-kali membuat pernyataan sebagai upaya penerapan sekularisme seperti saat pada akhir bulan Ramadhan, 19 Agustus 2012 (AFP dalam lepoint.fr 2012a), pada bulan Agustus 2012 (Guénois 2012), serta peringatan dari Perdana Menteri

Ayrault pada 19 September 2012 (Parti-socialiste.fr 2012). Sebagai bentuk persepsi anti-fundamentalisme Islam elit politik Perancis, semua pernyataan ditujukan terhadap seluruh muslim baik orang Perancis maupun imam non-Perancis agar menjaga dan tidak merusak prinsip sekularisme Perancis.

Pengaruh Penguatan Persepsi Antifundamentalisme Islam di Perancis terhadap Perilaku Politik Luar Negeri Perancis di Mali

Persepsi anti-fundamentalisme juga menjadi pandangan dalam melihat isu Islam internasional seperti halnya Menteri Luar Negeri (MenLu) Perancis, Laurent Fabius, yang menghubungkan protes Muslim atas video *Innocence Muslim* pada konteks intoleransi dan tindakan fundamentalis Islam. Selain itu, dia mengungkapkan bahwa Perancis menjadi salah satu negara yang terancam oleh kelompok tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Alarcón (2013). Jika ditarik pada periode sebelum 9/11, bentuk persepsi anti-fundamentalisme Islam telah mempengaruhi kebijakan luar negeri Perancis di Timur Tengah. Fragnon (2009) menjelaskan bahwa pemerintah Perancis khawatir akan ancaman dari kebangkitan fundamentalisme Islam di Iran dan Perancis berupaya mencegah fundamentalisme Islam menyebarkan ideologinya ke seluruh wilayah Timur Tengah. Sementara itu, pada Maret 1987, Presiden Perancis, François Mitterrand, membenarkan kekhawatiran ini. Hal ini ditunjukkan dengan kebijakan penjualan senjata ke Irak untuk melawan fundamentalisme Islam yang direpresentasikan oleh Iran yang membuat kebijakan untuk mengekspor model negara teokrasinya ke negara tetangga.

Pada tahun 1990-an, kekhawatiran Perancis terhadap ancaman fundamentalisme Islam kembali muncul dari negara Aljazair karena potensi partai fundamentalisme Islam FIS (*Front Islamique du Salut*), yang memiliki misi merubah sistem pemerintahan sekuler dengan sistem pemerintahan Islam, menjadi partai penguasa setelah memenangkan pemilu putaran pertama. Menteri Dalam Negeri, Pasqua, menganggap bahwa tidak ada kemungkinan fundamentalisme Islam moderat dan menerima sekularisme. Untuk itu Perancis mendukung rezim militer sekuler yang menghentikan pemilihan umum pada Januari 1992. Dukungan diberikan dalam bentuk kebijakan bahwa Perancis tidak akan memotong bantuan ekonomi ataupun politik kepada pemerintah militer Aljazair yang memperjuangkan sekularisme melawan kelompok fundamentalisme Islam yang sangat fundamentalis,

kelompok yang tidak menghormati hak asasi manusia. Bahkan kelompok fundamentalisme Islam diungkapkan sebagai perilaku binatang buas yang tidak mengenal moral (Sinclair 1995).

Perancis mengalami teror dari *Groupe Islamique Armé* (GIA) sejak pertengahan 1990an karena mendukung rezim militer sekuler Aljazair. Para elit politik menjelaskan terror tersebut sebagai keterhubungan antara fundamentalisme Islam dan terorisme. Mereka juga menjelaskan bahwa terorisme diwujudkan oleh fundamentalisme Islam dengan ideologi Islamisme yang menginginkan negara Islam. Dengan begitu, pemerintah merujuk fundamentalisme Islam sebagai sumber teroris dengan misi Islamisme.

Menurut Fragnon (2009), representasi ini menyebabkan pandangan terhadap terorisme sebagai konsekuensi dari perkembangan fundamentalisme Islam yang didasarkan pada penolakan terhadap nilai-nilai modernitas sekuler. GIA dipahami hanya dari sudut agama di mana kekerasan merupakan akibat wajar dari praktek ekstremis agama. Fundamentalisme diartikan sebagai penyimpangan dari agama asli yang meninggalkan penafsiran bidang agama atau moral; bahwa fundamentalisme adalah keinginan untuk melembagakan agama dalam struktur negara dan sosial yang berarti melawan sekularisme. Hal ini membuat citra Islam secara alami menjadi agama kekerasan. Semua ini menunjukkan bahwa tradisi sekularisme merupakan bagian dari pembuatan kebijakan baik dalam negeri maupun luar negeri Perancis dalam melihat fenomena fundamentalisme Islam terlebih yang mengarah pada kekerasan. Tradisi ini dapat dilihat kembali dalam kasus intervensi Perancis di Mali.

Dilain pihak, anti-sekularisme merupakan bentuk kekecewaan yang dalam terhadap kegagalan negara sekuler demokrasi dunia ketiga yang mengakibatkan pergolakan antara nasionalisme agama dan nasionalisme sekuler sejak 1990-an (Petito & Hatzopoulos 2003). Hal ini terlihat dari pemberontakan Ansar Dine untuk mereformasi sistem pemerintahan sekuler Mali menjadi sistem pemerintahan yang berdasarkan syariah. Dalam konteks tersebut, John L. Esposito (2000) mengungkapkan bahwa Islam muncul sebagai alternatif atas kegagalan terhadap ideologi sekuler. Ilmuwan politik Barat Bassam Tibi mencatat bahwa masalah utama berkaitan dengan politik Islam merupakan bentuk pemberontakan terhadap tatanan sekuler yang ada. Politik Islam sepenuhnya dipahami hanya dalam oposisinya terhadap sekularisme dan sebaliknya (Hurd 2004a). Klaim atas ancaman terhadap prinsip

universal sekularisme inilah yang dipertaruhkan dalam kebijakan intervensi militer Perancis di Mali.

Hal ini terlihat jelas ketika kekhawatiran berkonsentrasi pada pembentukan negara Islam oleh Ansar Dine. MenLu pemerintahan Sarkozy, Alain Juppe menyatakan bahwa “Ansar Dine, dengan AQIM, mungkin akan memperluas kontrol seluruh wilayah Mali untuk menjadi republik Islam”. Menurutny, bentuk klaim agama oleh Ansar Dine dalam ranah politik demokrasi merupakan hal yang tidak dapat diterima (AFP dalam Liberation.fr 2012c). Untuk itu, Perdana Menteri Jean-Marc Ayrault pada 3 Juli 2012 menyampaikan tekat Perancis untuk menghentikan kelompok-kelompok seperti fundamentalisme Islam yang mengancam perdamaian dan kemakmuran seluruh wilayah Mali, seperti keselamatan kita sendiri” (AFP dalam Lefigaro.fr 2012d).

Dalam pandangan sekulernya, kelompok fundamentalis merupakan “*bad Islam*” yang irrasional, tidak toleran, mengancam kebebasan beragama serta mengklaim agama dalam politik Mali yang sekuler (Lejdd.fr 2012). Bagi Hollande, tidak ada cara untuk menghentikannya kecuali dengan memerangi mereka (Ambafrance-es.org 2012). Terkait keterlibatan Perancis dalam krisis Mali, Presiden Hollande menegaskan bahwa keterlibatannya bukan terkait politik *Françafrique* karena “masa dari apa yang disebut sebagai “la Françafrique” telah berakhir digantikan dengan hubungan yang didasarkan pada penghargaan, kejelasan dan solidaritas” (Lexpress.fr 2012). Oleh karena itu, Fabius menerangkan bahwa Perancis memilih posisi sebagai fasilitator dalam menemukan solusi internasional (Lci.tf1.fr 2012). Presiden Hollande juga mengatakan bahwa Perancis mendukung ECOWAS dan PBB untuk intervensi militer memukul mundur kelompok fundamentalis Islam sebatas pada hal yang dibutuhkan (Elysee.fr 2012) di bawah pasukan perdamaian PBB African-led International Support Mission to Mali (AFISMA) (International Crisis Group 2013).

Dengan pengaruh kuat dari persepsi anti-fundamentalisme Islam, Perancis kemudian memutuskan untuk melakukan intervensi militer. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Hollande bahwa “Mali sedang menghadapi serangan dari unsur-unsur teroris dari utara yang mana seluruh dunia mengetahui kebrutalan dan fanatisme mereka. (...) Para teroris harus tahu bahwa Perancis akan selalu ada meski tidak ada kepentingan mendasar tapi -kepentingan untuk menjaga- hak-hak masyarakat Mali yang ingin hidup dalam kebebasan dan demokrasi” (discours.vie-publique.fr, 2013). Duta Besar Perancis untuk Mali,

Christian Rouyer, pada 16 Januari 2013, lima hari setelah peluncuran operasi *serval*, juga menekankan bahwa kehadiran militer Perancis tidak lain adalah untuk menegaskan prinsip pendirian yang sama antara Mali dan Perancis yakni demokrasi dan sekularisme dari ancaman kelompok yang memaksakan agama dalam politik yakni Ansar Dine, kelompok fundamentalisme Islam (Ambafrance-ml 2013).

Pernyataan-pernyataan elit Perancis menunjukkan nilai sekularisme yang mengilhami mereka dalam perannya untuk menggambarkan fundamentalisme Islam adalah ancaman bagi negara sekuler. Ini menunjukkan keberadaan kuatnya persepsi anti-fundamentalisme Islam. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa Perancis ingin menerapkan prinsip universal sekularisme di level internasional. Seperti yang diungkap oleh Alarcón (2013) bahwa sekularisme pasti akan menjadi sudut pandang utama elit politik Perancis. Pada bulan November 2013, Laurent Fabius menunjukkan keinginan Perancis untuk menerapkan prinsip universal sekularisme dengan merumuskan “Kebijakan Luar Negeri dan Agama” yang merupakan misi internasional Perancis untuk menyelesaikan isu agama dengan mengeksplor prinsip-prinsip universal sekularisme Perancis yang telah menjadi landasan budaya politik dan hukum sekularisme Perancis dan memiliki basis yang sama dengan demokrasi yakni kebebasan hati nurani, netralitas negara dan hak politik dan sipil (Diplomatie 2013). Pernyataan Fabius menunjukkan sensitivitas Perancis terhadap fundamentalisme Islam dan sekularisme sebagai *an exercise of power* (Hurd 2004a). Karena itu memiliki posisi determinan dalam keputusan intervensi militer di Mali.

Simpulan

Sekularisme merupakan budaya politik Perancis yang memiliki prinsip-prinsip universal yang berupa kebebasan hati nurani, netralitas negara dan hak politik dan sipil. Penerapan sekularisme telah terjadi sejak 1789 terhadap Gereja Katolik kemudian kepada Islam sejak 1980-an. Hal ini dilakukan dengan upaya menetralkan Islam Perancis dari fundamentalisme Islam. Upaya ini menunjukkan persepsi negatif terhadap fundamentalisme Islam yang dibentuk oleh budaya politik sekularisme. Persepsi tersebut tidak hanya mempengaruhi pemerintah dalam memutuskan keputusan di tingkat domestik terkait Islam tetapi juga di tingkat internasional. Hal ini yang bisa dilihat dari keterlibatan Perancis dalam kasus kebangkitan Islam di Iran dan Aljazair.

Pada perkembangannya, persepsi anti-fundamentalisme Islam juga semakin menguat setelah tragedi 11 September 2001 yang ditunjukkan dengan beberapa kebijakan untuk melawan fundamentalisme Islam seperti larangan jilbab dan burqo serta beberapa kebijakan terkait praktek-praktek Islam yang tidak sesuai dengan prinsip sekularisme. Persepsi ini kemudian turut menjadi faktor determinan yang mempengaruhi keputusan Presiden Hollande untuk melakukan intervensi militer di Mali untuk menyerang kekuatan fundamentalisme Islam yang mengancam demokrasi-sekuler Mali. Pandangan yang menilai bahwa fundamentalisme Islam mengancam prinsip-prinsip universal sekularisme yang telah diterapkan oleh Mali. Fundamentalisme Islam yang mengancam prinsip-prinsip universal yang menjadi bagian dari misi kebijakan luar negeri Perancis. Oleh karena itu, kebijakan militer Perancis di Mali pada Januari 2013 dipengaruhi oleh penguatan persepsi antifundamentalisme Islam ini.

Daftar Pustaka

Buku

- Alarcón, A. (2013). *French and US Approaches to Foreign Policy*. Palgrave Macmillan.
- Barbier, Maurice, 2005. "Towards a Definition of French Secularism", translated by Gregory
- Bauberot, J. 2003. Secularism and French religious liberty: a sociological and historical view. *BYU L. Rev.*451.
- _____, J. 2010. The Evolution of Secularism in France. Dalam Cady, L. E., & Hurd, E. S. 2010. *Comparative secularisms in a global age*. Palgrave Macmillan.
- _____, Jean, 2006. The Secular Principle. Embassy of France in the USA.
- Bishop, Nicholas. "Les Affaires des Foulards". The Hijab Controversy in France: Communitarianism and the French Policy of Minority Assimilation. Dalam Jong, Janny de dkk. 2011. *Walking the Tightrope: Europe between Europeanisation and Globalisation*. Selected papers presented at the European Studies Intensive programme 2010, University of Groningen.
- Doyle, W. 2001. *The French Revolution: a very short introduction*. Oxford University Press.

- Durward, M. R., & Marsden, L. (Eds.). 2013. *Religion, conflict and military intervention*. Ashgate Publishing, Ltd.
- Haynes, J. (Ed.). 2008. *Routledge handbook of religion and politics*. Routledge.
- Hurd, E. S. 2008. *The politics of secularism in international relations*. Princeton University Press
- Kaarbo, J & Ray, J. Lee. Edisi kesepuluh. 2011. *Global Politics*. Wadsworth: Boston.
- Petito, F., & Hatzopoulos, P. (Eds.). 2003. *Religion in international relations: the return from exile*. Palgrave Macmillan.
- Regan, P. M. 2002. *Civil wars and foreign powers: Outside intervention in intrastate conflict*. University of Michigan Press.

Jurnal

- Baubérot, J. 2007. French Laicization in the Worldwide Context. *Religious Studies Review*, Vol.1 No.1, 74.
- Gunn, T. J. 2004. Religious freedom and Laïcité: A comparison of the United States and France. *BYU L. Rev.*, 419.
- Hurd, E. S. 2007. Political Islam and foreign policy in Europe and the United States. *Foreign Policy Analysis*, 3(4), 345-367.
- _____, E. S.. 2004a. The International Politics of Secularism: U.S. Foreign Policy and the Islamic Republic of Iran. *Alternatives: Global, Local, Political* 29: 115.
- Kuru, A. T. 2008. Secularism, state policies, and Muslims in Europe: Analyzing French exceptionalism. *Comparative politics* Vol.41 No.1, 1-19.
- Liogier, Raphaël, 2009, Laïcité On The Edge in France: Between The Theory Of Church-State Separation And The Praxis Of State-Church Confusion. *Macquarie Law Journal*:vol 9.
- Philpott, D. 2002. The challenge of September 11 to secularism in international relations. *World Politics*, 55(1), 66-95.
- Tarhan, Gulce. 2011. Roots of the headscarf debate: Laicism and secularism in France and Turkey. *Journal of Political Inquiry* 4 (2011): 1-17.
- Troper, Michel. 2009. Sovereignty and Laïcité. *Cardozo Law Review*, 30(6), 2561 - 2571.

Situs Internet

- AFP (Agent France Press), 19 Agustus 2012a. Ramadan: Hollande adresse ses vœux aux musulmans et loue la laïcité [Online]. Dalam http://www.lepoint.fr/politique/ramadan-hollande-adresse-ses-vœux-aux-musulmans-et-loue-la-laicite-19-08-2012-1497136_20.php
- _____, 03 Juli 2012d. Ayrault : "freiner Aqmi au Mali" [Online]. Dalam <http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/07/03/97001-20120703FILWWW00857-ayrault-freiner-aqmi-au-mali.php>
- _____, 2012c. Juppé craint une alliance entre Touaregs et Aqmi au Mali [Online]. Dalam http://www.liberation.fr/monde/2012/04/03/juppe-craint-une-alliance-entre-touaregs-et-aqmi-au-mali_808082
- Ambafrance-es.org, 2012. Politik Afrika / Suriah / Sahel - Wawancara Presiden Republik dengan " 24 RFI -France TV5 Monde " - Paris , 11 Oktober 2012 [Online]. Dalam <http://www.ambafrance-es.org/Mali-ONU-adoption-de-la-resolution>
- Ambafrance-ml, 2013. Discours de M. l'Ambassadeur, lors de la visite du Chef de l'Etat malien aux forces armées françaises [Online]. Dalam <http://www.ambafrance-ml.org/Discours-de-M-l-Ambassadeur-lors>
- CLR (Comité Laïcité République). 03 April 2012. François Hollande : "La cohérence, c'est appliquer les valeurs de la République" [Online]. Dalam <http://www.laicite-republique.org/francois-hollande-la-coherence-c.html>
- Diplomatie, 6 novembre 2013. Intervention de Laurent Fabius au colloque "Religion et politique étrangère" [Online]. Dalam <http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministre/laurent-fabius/discours-21591/article/intervention-de-laurent-fabius-au-109024>
- Discours.vie-publique.fr, 2013. Déclaration de M. François Hollande, Président de la République, sur l'intervention militaire au Mali, à Paris le 11 janvier 2013 [Online]. Dalam <http://discours.vie-publique.fr/notices/137000058.html>
- Elysee.fr, 11 Oktober 2012. Interview du Président de la République par FRANCE 24, TV5MONDE ET RFI [Online]. Dalam <http://www.elysee.fr/interviews/article/interview-du-president-de-la-republique-par-france-24-tv5monde-et-rfi/>
- Fragon, Julien. 2009. la gestion politique du 11 septembre en France. Desertasi jurusan Ilmu Politik Universitas Lumière Lyon Perancis [Online]. Dalam <http://theses.univ->

- lyon2.fr/documents/lyon2/2009/fragnon_j#p=198&q=Les
prémisses du terrorisme « transnational »&a=TH.4.1.1.1.2
- Guénois, Jean-Marie. 27 Agustus 2012. Valls appelle l'Islam de France à s'organiser [Online]. Dalam <http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/09/27/01016-20120927ARTFIG00719-valls-appelle-l-islam-de-france-a-s-organiser.php>
- Lci.tf1.fr, 25 September 2012. Fabius a "bon espoir" d'un accord pour intervenir au Mali [Online]. Dalam <http://lci.tf1.fr/monde/afrique/fabius-a-bon-espoir-d-un-accord-pour-intervenir-au-mali-7545214.html>
- Lexpress.fr, 12 Oktober 2012. Ce qu'a dit François Hollande à Dakar [Online]. Dalam http://www.lexpress.fr/actualite/politique/ce-qu-a-dit-francois-hollande-a-dakar_1173840.html#Q7GPThHamCQ1KS6A.99
- Parti-socialiste.fr, 9 Septembre 2012. Jean-Marc Ayrault : «La liberté d'expression doit être garantie mais chacun doit exercer cette liberté avec responsabilité et respect» [Online]. Dalam <http://www.parti-socialiste.fr/articles/jean-marc-ayrault-notre-republique-na-pas-du-tout-lintention-de-se-laisser-intimider>
- Sinclair, Anne. Interview de M. Jacques Chirac, Président de la République, à TF1 le 10 septembre 1995, sur la lutte contre le terrorisme, la reprise des essais nucléaires et l'engagement militaire pour faire respecter les zones de sécurité par les Serbes de Bosnie [Online]. Dalam <http://discours.vie-publique.fr/notices/957009800.html>

